

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari usaha ekonomi skala kecil yang digerakkan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tepatnya, (Alma, 2018, p. 157) menjelaskan, sebutan PKL menunjuk pada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak memiliki izin usaha. Berbagai keterbatasan tersebut, menandakan bahwa PKL sangat rentan terhadap masalah keuangan usaha, disamping kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan “mengsubordinasikan” kelompok usaha ini.

Terlepas dari kondisi tersebut, PKL merupakan usaha ekonomi yang sudah teruji dalam berbagai situasi krisis ekonomi. Hal ini dapat dipelajari ketika situasi perekonomian nasional maupun global mengalami kontraksi, aktivitas dagang PKL terus menjalani rutinitasnya. (Depkop, 2008) mencatat, pengalaman pada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, membuat Usaha Besar (UB) satu persatu bangkrut. Sementara usaha berskala mikro, termasuk PKL cenderung dapat bertahan. Catatan pengalaman tersebut menggambarkan bahwa pelaku usaha ekonomi PKL memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas perekonomian di sebuah negara

Setiap kota selalu ada PKL, tidak terkecuali di Kota Ternate. Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, hampir semua pelaku usaha terkena imbasnya, tidak terkecuali usaha di sektor mikro dan kecil. Dinas Koperasi dan

UKM Kota Ternate mencatat, terdapat 13.700 pendapatan pelaku usaha menurun drastis sehingga pemerintah pun turut memberikan bantuan 2,4 juta pada pelaku usaha dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan (Media Kieraha.com, 31/8/2020). Kebijakan tersebut relatif tidak berlaku untuk PKL, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah usaha. Namun demikian, PKL tetap *survive* sekalipun di bawah cengkraman situasi yang tidak menentu.

Hasil pengamatan menunjukkan kecenderungan tersebut, hal mana pelaku usaha PKL masih terus menjajakan dagangannya, baik yang teramati di kawasan Terminal Gamalama, Terminal Bastiong, kawasan Jalan. Pahlawan Revolusi, dan beberapa pedagang bergerobak yang rutin beraktifitas di tempat-tempat strategis, seperti di depan Taman Nukila, dan juga di Pantai Falajawa Kota Ternate. Dinamika semacam itu tidak selalu berjalan lancar, PKL sering mendapat perlakuan yang kurang etis, yang dalam kasus tertentu diusir dan dianiyaya. Satu contoh kasus tahun 2018 di Kota Ternate, sebagaimana dikutip dari Media Suara Indonesia News (2018), ada PKL yang dianiyaya oleh oknum salah satu instansi pemerintah daerah. PKL tersebut diusir, jualanannya diobrak-abrik, dan mendapat perlakuan kasar karena tidak membayar upeti pada oknum tersebut.

Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid dalam (Hayat, 2012) menyebutkan bahwa, kondisi tersebut sebagai dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak diikuti oleh kesadaran untuk memberikan peluang dan suasana yang mendukung bagi mereka yang bergerak di sektor informal sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi. Cara pandang terhadap profesi PKL cenderung tidak berimbang. Artinya profesi ini seolah tidak diinginkan untuk hadir.

Alasannya sederhana, aktivitas PKL cenderung dinilai mengurangi keindahan kota dan menyebabkan kesemerawutan.

Penilaian semacam itu tidak berarti tidak mengandung kebenaran, namun kalau kita mau berpikir lebih terbuka, PKL dapat memberikan skala pelayanan ekonomi yang cepat dan mudah, penyerap tenaga kerja dan sebagai pembayar retribusi (Ubaidillah et al., 2013). Secara filosofis, ada kontribusi PKL yang “gagal” dibaca oleh khalayak umum. Artinya, barang yang dijual oleh PKL itu memiliki hubungan dengan usaha-usaha bisnis berskala besar. Sebagai contoh, penjual makanan, PKL tentu membutuhkan bahan mentah dari berbagai sektor usaha formal, dan secara tidak langsung hubungan itu menguntungkan sektor formal. Contoh lain, penjual majalah atau koran, ini semua adalah barang dagangan milik media-media ternama.

Cara pandang yang tidak berimbang terhadap PKL, menuntut PKL untuk bisa mempertahankan hidupnya sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok masyarakat yang cenderung tidak punya kemampuan akses apapun, baik akses ekonomi, politik, hukum maupun lainnya. Menurut (Hayat, 2012), PKL hanya mengandalkan tenaga sebagai satu-satunya alat produksi sehingga dengan tenaga itulah mereka mencoba mempertahankan diri. Sebagaimana dalam pemahaman umum, tenaga akan mengalami penyusutan kapasitas, sehingga memaksimalkan pekerjaan adalah cara yang paling rasional bagi PKL. Logika *subsistence* seperti itulah yang harus dipilih PKL untuk mempertahankan diri.

Dalam situasi demikian, maka eksistensi usaha PKL tentu sulit terhindar dari masalah “kesulitan keuangan”. Dalam literatur manajemen keuangan, istilah “kesulitan keuangan” sering sepadan dengan apa yang disebut “*financial*

distress". (Platt & Platt, 2006) menggambarkan "*financial distress*" sebagai suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan usaha (Almilia, 2006). Gambaran tersebut mengandung pengertian bahwa *financial distress* merupakan penanda akan terjadi kebangkrutan jika pelaku usaha tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan usahanya.

Hanya saja, studi tentang *financial distress* selalu difokuskan pada usaha-usaha berskala besar. Penelitian-penelitian yang mengkaji faktor determinan *financial distress* di Indonesia, pada umumnya didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang diturunkan menjadi beberapa rasio keuangan. (Nugraha & Fajar, 2018) mengkaji *financial distress* dengan melihat kemampuan suatu entitas bisnis dalam mengelola hutang dan kemampuan memperoleh keuntungan. Kemudian studi (Zhafirah & Majidah, 2019) menambahkan aspek ukuran perusahaan (total aset) dan ukuran dewan direksi untuk melihat pengaruhnya terhadap *financial distress*.

Penelitian-penelitian yang disebutkan, semua mengambil objek pada perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Sementara usaha seperti PKL, sejauh ini belum nampak ada studi yang mengkaji tentang *financial distress*. Ada beberapa alasan dapat dikemukakan, diantaranya: 1) peneliti cenderung menghadapi kesulitan memperoleh data sekunder seperti laporan keuangan PKL guna menghitung tingkat *financial distress*; 2) sejauh yang ditelusuri, studi tentang *financial distress* masih monoton menggunakan pendekatan kuantitatif. Dua alasan tersebut relatif tidak dapat mengungkap aspek kualitatif yang mungkin mengungkap "makna lain" tentang *financial distress*.

Dalam paradigma studi kualitatif, situasi tersebut perlu dipelajari, diidentifikasi, dan diinterpretasi apa makna dari sesuatu yang disebut "*financial distress*" bagi pelaku usaha PKL. Tentu, indikator-indikator yang selama ini digunakan seperti masalah utang, modal, dan sejenisnya selalu mendapat perhatian dalam pembahasan, namun paradigma studi kualitatif menuntut adanya penafsiran-penafsiran lebih mendalam untuk menemukan makna lain berdasarkan ragam pemahaman pelaku PKL terkait topik *financial distress*.

Misalnya, terdapat gejala yang menunjukkan bahwa PKL memilih bertahan dengan "situasi" yang ada, dalam pandangan umum dinilai sebagai sekedar alasan untuk "bertahan hidup" seperti kasus pada umumnya. Namun pada kenyataannya, semua usaha bertolak dari "filosofi" yang relatif sama, yaitu sama-sama "bertahan hidup" dalam suasana kompetisi usaha yang dihadapi. Faktor yang cenderung membedakan adalah kemampuan mengakses sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya keuangan, hukum, maupun politik. Dalam konteks seperti itu memungkinkan adanya keragaman pemahaman terkait *financial distress*.

Atas kepentingan tersebut, maka pendekatan dalam studi kualitatif yang dinilai sesuai adalah pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika memiliki corak orientasi yang terbuka, sebagaimana sejalan dengan pandangan Crawford dalam (Nazir, 1988) bahwa penelitian harus didasarkan pada pandangan terbuka, "ingin tahu" dan berasumsi bahwa suatu fenomena mempunyai "hukumnya" sendiri. (Sugiharto, 1996) menjelaskan bahwa objek utama hermeneutik adalah segala bentuk "teks", termasuk di dalamnya adalah istilah dan data-data keuangan. Dengan demikian, dalam beberapa studi

keuangan, pendekatan hermeneutika ini berhasil mengungkap makna lain di luar makna “konvensional”.

Sebagai misal, (Purnamasari & Triyuwono, 2010) dalam studi tentang tafsir hermeneutika intensionalisme atas “Laba” Yayasan Pendidikan. Studi ini menemukan tiga makna laba, yaitu laba materi, laba sosial, dan laba kenangan. Pemahaman atas ketiga makna laba tersebut terbukti mewarnai setiap gerak hidup Yayasan. Studi literatur oleh (Ekasari, 2014) tentang hermeneutika laba dalam perspektif Islam menemukan bahwa dalam Al-Quran, bisnis tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan saja, namun laba diterjemahkan sebagai ikhtiar memakmurkan sesama manusia, alam dan lingkungan sekitarnya.

Studi awal peneliti pada PKL di Kota Ternate menunjukkan gejala hermeneutis, hal mana gambaran tentang *financial distress* tidak sekedar terpaku pada makna “konvensional”, tetapi ada makna lain yang memerlukan penafsiran mendalam peneliti dalam aktivitas penelitian. Misalnya, wawancara peneliti dengan Ibu Anti, salah satu pelaku PKL sayur-sayuran di lingkungan Belakang Jatiland Mall Kota Ternate Tengah, sebagaimana berikut ini.

“Cobaan, tong kuat ka tarada, tong lanjut ka tarada. Dari situ ibu bisa hadapi hal hal sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup”
(Wawancara Ibu Anti 16/06/22)

Hal pertama yang tergambar adalah ucapan rasa syukur, ini merupakan pemahaman yang mengarah pada selain makna “konvensional” dan sering terucap ke permukaan. Berikut adalah wawancara dengan Ibu Wastumi, PKL Jagung rebus dan kacang rebus didepan Pantai Falajawa Kota Ternate Tengah.

“Rasa sulit itu biasa. Yoo namanya orang jualan kadang kadang sunyi kadang yo rame. Sunyi yo alhamdulillah tapi rame yo alhamdulillah”
(Wawancara dengan Ibu Wastumi 09/08/22)

Kesulitan keuangan, menurut informan Ibu Wastumi, tidak dihayati sebagai yang dimaksud oleh Kovenisional tetapi sebagai ‘Rasa Syukur’. Pemahamannya

tentang masalah kesulitan cenderung berpandangan bahwa dalam menjalankan bisnis, segala situasi yang terjadi harus selalu disyukuri dengan selalu memanjatkan '*Alhamdulillah*'. Secara hermeneutis, pemaknaan semacam itu sudah melibatkan cakrawala informan, baik terkait dengan orientasi diri, pengalaman-pengalaman informan, keyakinan, nilai-nilai kultural yang meliputi informan ketika "kata" itu diucapkan.

Berdasarkan dasar pikir di atas, peneliti merasa tertarik menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika intensionalisme untuk penelitian yang berfokus pada "**Makna *Financial Distress* Bagi PKL di Kota Ternate**".

1.2. Motivasi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, pengalaman dan pengamatan terhadap situasi PKL, serta penghayatan peneliti, maka terdapat dorongan untuk meneliti apa makna *financial distress* yang dapat diungkap dari PKL. 1) uraian pada latar belakang, terlihat ada unsur kebaruan, hal mana studi tentang *financial distress* sejauh pengetahuan peneliti, belum tersedia studi-studi terdahulu; 2) berdasarkan pengamatan peneliti, PKL melakukan aktivitas setiap hari walaupun dengan tempat yang tidak menentu dan jumlah barang dagangan cenderung sedikit dengan harga relatif murah; 3) terkait penghayatan peneliti, lebih pada keterpanggilan etis untuk memahami tentang bagaimana PKL memaknai hidup dan kesulitan dalam usaha mereka. Sebagaimana yang dibahasakan oleh Lincoln dan Guba dalam (Creswell, 2019) bahwa, tradisi penelitian kualitatif bertumpu pada penerapan pengetahuan yang tersirat (intuitif atau perasaan), karena sering kali nuansa dari beragam realitas hanya dapat diapresiasi dengan cara ini.

1.3. Fokus Penelitian

Merujuk pada pendapat (Creswell, 2019:165), peneliti kualitatif harus fokus pada satu gagasan utama untuk dieksplorasi dan dipahami. Artinya tidak boleh meluas pada dua atau lebih variabel yang saling berelasi. Untuk itu pilih satu fenomena saja, namun bisa saja berkembang untuk mengeksplorasi atau perbandingan antar gagasan dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada **“Makna *Financial Distress* Bagi PKL di Kota Ternate”**.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengungkap dan memahami makna *financial distress* bagi PKL di Kota Ternate dengan pendekatan hermeneutika intensionalisme
- 2) Untuk mengungkap dan memahami respon pelaku usaha PKL Kota Ternate jika terjadi *financial distress* pada pengelolaan keuangan usahanya

1.5. Kontribusi Penelitian

- 1) Secara Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada bidang kajian manajemen keuangan dan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan.
- 2) Secara Praktis
 - Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna *financial distress* dan temuannya dapat menjadi bahan informasi bagi pelaku usaha PKL di Kota Ternate.
 - Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi pelaku usaha PKL dalam memaknai masalah pengelolaan keuangan saat mengalami kesulitan menjalankan usaha
 - Manfaat lain dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada *stakeholder* dan pemerintah Kota Ternate terkait pemberdayaan PKL.